

MEMBANGUN PEREKONOMIAN KELOMPOK TANI HUTAN melalui Peningkatan Nilai Hasil Hutan Bukan Kayu

ARTIKEL LAINNYA

PELATIHAN BUDIDAYA LEBAH MADU bagi Kelompok Tani Hutan di Kampung Dukungan FORCLIME di Papua Barat

BAPPEDA SULAWESI TENGAH GELAR FORUM Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Cagar Biosfer Lore Lindu 2022

BIMBINGAN TEKNIS SUSUN RENCANA PENGELOLAAN Jangka Panjang bagi KPH di Papua

Editorial

Newsletter edisi ini menyajikan produk-produk olahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari empat kampung yang didampingi FORCLIME yang berada di wilayah KPH Tambrau dan Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, yakni di Kampung Emaus dan Kampung Bikar masing-masing berada di wilayah Distrik Sausapor dan Distrik Bikar, Kabupaten Tambrau; Selanjutnya, Kampung Haha dan Kampung Wendi masing-masing berada di wilayah Distrik Saremuk dan Distrik Sawiat, Kabupaten Sorong Selatan. Berdasarkan temuan awal pada akhir 2021 dan awal 2022, kampung-kampung tersebut memiliki beberapa potensi HHBK yang dapat dikembangkan untuk usaha ekonomi kreatif, antara lain kemiri, minyak lawang, VCO kelapa, nilam, gaharu, rotan, masoi, madu, pisang, anggrek, sarang semut, sagu, keladi, dan jenis lainnya yang diperoleh dari sungai berupa udang batu dari jenis udang biru, coklat dan merah.

Ada delapan Kelompok Tani Hutan (KTH). Di Kampung Wendi dan Kampung Haha masing-masing tiga kelompok. Sedangkan di Kampung Emaus dan Kampung Bikar masing-masing satu kelompok. Terhadap delapan KTH telah dilakukan serangkaian kegiatan pendampingan KTH untuk membangun perekonomian masyarakat (KTH) dengan memanfaatkan dan meningkatkan nilai tambah HHBK berdasarkan kearifan lokal masing-masing kampung, untuk mendorong berkembangnya sentra HHBK unggulan. Warga kampung kini lebih percaya diri dalam menunjukkan daerahnya, seperti “Kampung Bikar adalah kampung penghasil minyak lawang”, “Kampung Emaus adalah kampung kemiri”, “Kampung Haha dikenal sebagai Kampung Gaharu”, dan Kampung Wendi dikenal dengan HHBK yang berkualitas.

Dilihat dari proses pendampingan KTH tahun ini, masing-masing KTH berambisi mewujudkan visi dan misi yang digagas oleh seluruh anggota

KTH yang ada yaitu “Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera”. Sebelum adanya pendampingan, mereka hanya memanfaatkan buah kemiri sebatas bumbu masak, hanya memanfaatkan komoditas HHBK sebagai produk subsisten dan semi komersial; dengan pendampingan KTH, mereka telah berhasil menghasilkan produk masker rambut dan minyak kemiri dalam kemasan botol 250 ml. Demikian pula dengan kampung-kampung binaan lainnya telah mampu melakukan diversifikasi hasil olahan HHBK. Baru sekarang mereka menyadari bahwa masing-masing HHBK unggulan mereka memiliki potensi yang sangat besar dari sudut pandang ekonomi.

Hasil analisis proses pendampingan KTH oleh tenaga Pendamping Lokal Kampung (PLK) bekerja sama dengan KPH menunjukkan beberapa strategi prioritas yang dapat diterapkan dan dikembangkan pada komunitas KTH untuk membangun ekonomi KTH melalui pengolahan dan pemasaran produk olahan HHBK. Strategi tersebut antara lain mendorong setiap produk memiliki SOP, PIRT, dan BPOM untuk pengolahan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk serta mendapatkan izin edar untuk produk industri rumahan. Selanjutnya, untuk meningkatkan nilai tambah HHBK dan diversifikasi produk, KTH perlu meningkatkan kemampuannya melalui Diklat, kerja sama program magang, studi banding, dan pengembangan hasil penelitian. Strategi lainnya membutuhkan upaya agresif untuk memperluas saluran pemasaran, manajemen stok, dan memperkuat kapabilitas KTH melalui pendampingan berkelanjutan dalam kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usahanya. Bagian terakhir yang tak kalah pentingnya, terutama di wilayah KTH dan kampung yang mendapatkan persetujuan pemerintah melalui Program Perhutanan Sosial, strategi untuk memasukkan kegiatan KTH ke dalam program Perhutanan Sosial merupakan ide yang ideal.

Mohammad Sidiq

Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat



Membangun Perekonomian Kelompok Tani Hutan melalui Peningkatan Nilai Hasil Hutan Bukan Kayu

Melanesia Brigitte Boseran, Advisor Junior bidang livelihood pedesaan, pengelolaan dan konservasi hutan

Proses Pendampingan

Komunikasi, konsultasi, dan pendampingan yang intensif telah mendapatkan kepercayaan dari anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) dan penerimaan dari perangkat kampung binaan. Seluruh proses dimulai dengan penerapan kerangka pengaman (*safeguards*) di tingkat lapangan melalui sosialisasi prinsip-prinsip *Free, Prior Informed Consent* (FPIC). Proses pendampingan berlangsung di empat kampung binaan FORCLIME, yaitu Kampung Emaus dan Kampung Bikar di Kabupaten Tambrauw, serta Kampung Haha dan Kampung Wendi di Kabupaten Sorong Selatan.

Pendampingan yang diberikan oleh tenaga Pendamping Lokal Kampung (PLK) yang bermitra dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) membuat KTH terbuka terhadap wawasan baru. Selain itu, kepeloporan dari PLK telah menghasilkan *local champion* KTH yang mampu menyusun program kerja KTH (Rencana Kerja Kelompok-RKK) secara partisipatif. RKK merupakan pedoman bagi masyarakat

untuk mewujudkan motivasi “*Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera*”. Bersama-sama, mereka telah mengembangkan serangkaian program/kegiatan yang berfungsi sebagai panduan bersama untuk mencapai tujuan melestarikan sumber daya hutan dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar dan/atau di dalam hutan.

Dari segi pembinaan, salah satu tujuan KTH dalam melaksanakan RKK di kampung binaan adalah untuk meningkatkan perekonomian melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), menjadikan seluruh anggota KTH sebagai sasaran utama. Dalam konteks ini, seluruh anggota KTH berkeinginan untuk meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan potensi HHBK lokal yang berkualitas tinggi di kawasan hutan untuk menghasilkan produk turunan. Tindakan nyata yang dilakukan oleh seluruh anggota KTH adalah produk makanan olahan dan obat herbal berbahan dasar HHBK dengan harapan dapat diterima oleh masyarakat luas dan mendapatkan akses pasar.



Pemetikan daun pohon gaharu untuk pembuatan teh di Kampung Haha.

Tujuan Pendampingan

Salah satu tujuan pendampingan pengelolaan usaha adalah untuk membantu masyarakat melalui KTH untuk mengembangkan berbagai potensi HHBK dan Jasa Lingkungan yang ada di wilayah kampungnya sesuai dengan strategi pengembangan sumber daya manusia sehingga dapat mencapai pembangunan yang lebih baik, kualitas hidup, dan dapat mendorong peningkatan ekonomi.

Tidak adanya pendampingan dalam pengelolaan usaha, masyarakat di kampung menggunakan komoditas HHBK sebagai produk subsisten dan semi komersial. Pemanfaatannya masih dilakukan secara tradisional, bahkan belum tersedia secara komersial (belum memiliki *brand* sendiri). Untuk itu konsep pemberian pendampingan melalui KTH adalah membangun keterlibatan masyarakat, pemberdayaan, komunikasi, dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan nilai tambah potensi HHBK di wilayah ulayat masyarakat. Proses pembinaan dimulai dari dasar-dasar untuk menghasilkan produk untuk pemasaran lebih lanjut.



Produk Masker Rambut dan Minyak Kemiri dari Kampung Emaus

Masker rambut dan minyak kemiri merupakan produk olahan yang terbuat dari buah kemiri yang bebas bahan kimia sehingga aman digunakan kapan saja untuk menutrisi rambut dan mengurangi uban.

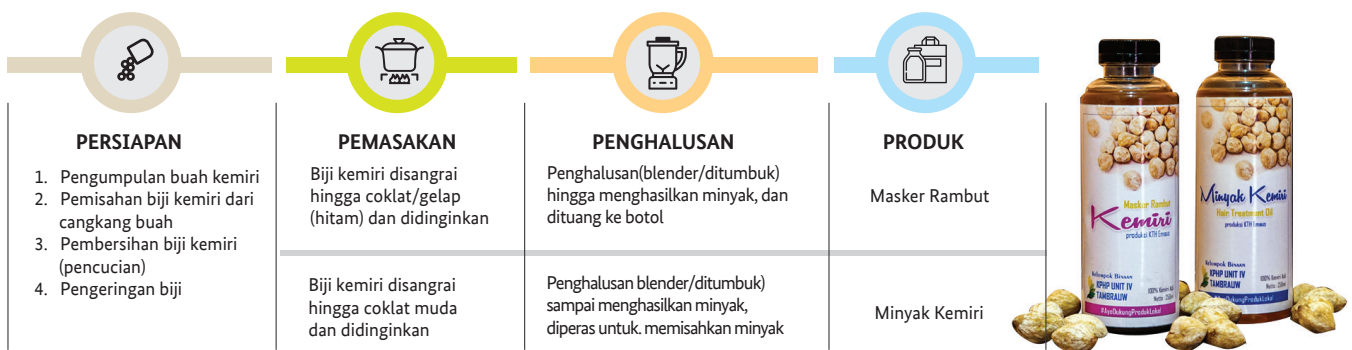
Hutan di Kampung Emaus, Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya, berada di wilayah ulayat masyarakat dan kaya akan HHBK. Salah satu jenis HHBK unggulannya adalah buah kemiri. Pohon kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd) di daerah ini cukup banyak, dan tumbuh alami di sepanjang daerah pesisir Distrik Sausapor dan di perkebunan milik anggota KTH.

Ada banyak kemiri di kampung ini. Hampir setiap rumah tangga dapat memanen 20 kilogram buah kemiri sekaligus, dan mendapatkannya secara tidak menentu setiap bulan sesuai kebutuhan. Pemanenan sangat sederhana, tidak menebang pohon, tidak memetik buah langsung dari pohonnya, tetapi membiarkan jatuh ke tanah secara alami, dan mengumpulkan buah yang jatuh.

Sebelum adanya pendampingan, sebagian besar masyarakat Kampung Emaus sudah menggunakan buah kemiri di dapur sebagai bumbu masak secara turun temurun, selain kebutuhan dapur, masyarakat juga biasa berjualan biji kemiri untuk kebutuhan makanan pokok dan biaya pendidikan. Dengan pendampingan KTH, masyarakat di kampung ini telah mampu memproduksi masker rambut dan produk minyak kemiri dalam kemasan botol 250ml. Semua anggota KTH termotivasi untuk mengembangkan produk tersebut karena mereka memahami dan menganggap serius apa yang harus dilakukan untuk keuntungan ekonomi, dan mereka setuju untuk mengelola ekonomi yang berkelanjutan, yaitu dengan memanfaatkan HHBK tanpa merusak keadaan hutan di wilayah kampung mereka.



Pelatihan pembuatan masker rambut dan minyak kemiri di Kampung Emaus.



Produk Minyak Lawang dari Kampung Bikar

Minyak lawang adalah minyak atsiri yang terbuat dari kulit dan kayu lawang (*Cinnamomum cullilawan* BI) melalui proses penyulingan uap dan air. Minyak ini beraroma, menghangatkan, dan berkhasiat. Secara tradisional digunakan sebagai obat luar (obat gosok) karena menghangatkan kulit

Kampung Bikar merupakan salah satu kampung penghasil minyak lawang yang terletak di Distrik Bikar, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya. Tempat penyulingan terletak di dusun/ladang kecil di dalam hutan sekitar 1–2 hari perjalanan dari kampung. Proses penyulingan dilakukan di tenda-tenda milik masing-masing marga pemilik tanah ulayat. Dengan metode dan kondisi tempat kerja yang demikian, dibutuhkan waktu 4–7 hari per kelompok untuk menghasilkan minyak lawang. 10 – 30 liter diproduksi rata-rata dalam 7 hari kerja dan dijual dengan harga pengumpul di Sorong Rp350.000 – Rp450.000 per liter.

Di kampung ini, membuat minyak lawang merupakan salah satu mata pencaharian utama masyarakat. Hasil penjualan minyak ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di kampung, antara lain sembako, biaya pendidikan, biaya transportasi dan biaya pengobatan. Namun secara keseluruhan, pendapatan dari minyak lawang tidak berkontribusi banyak terhadap pendapatannya karena biaya operasional suatu proses produksi tidak sebanding dengan pendapatan.

Dalam hal pengelolaan usaha, pendampingan kepada KTH Bikar difokuskan pada upaya optimalisasi proses produksi agar lebih efektif dan efisien, namun tetap berbasis aset yang dimiliki (pohon lawang). Dengan

pendampingan dari tenaga pendamping lokal kampung dan KPHP Unit IV Tambrauw, KTH Bikar terdorong untuk bereksperimen memiliki dan mengembangkan berbagai produk dari kayu lawang yaitu produksi minyak lawang dalam kemasan botol 150ml.

Salah satu tantangan dalam usaha ini adalah kayu lawang tumbuh liar di hutan, jarang dibudidayakan, dan pertumbuhannya sangat terbatas di sekitar hutan. Karena cara budidaya tidak jauh berbeda dengan tanaman kayu manis lainnya, maka Dinas Kehutanan dan KPH membantu pengembangan agroforestri pohon kayu lawang melalui program perhutanan sosial dan rehabilitasi lahan merupakan pilihan strategis untuk mempertahankan sumber penghidupan yang berkelanjutan.



Proses pembuatan minyak lawang di Kampung Bikar.

4



PERSIAPAN

1. Pengupasan kulit kayu lawang
2. Pencacahan kulit kayu lawang



PEMASAKAN

1. Memasak minyak lawang
2. Penyulingan



PENYARINGAN

1. Penyaringan minyak lawang



PRODUK

1. Minyak Lawang



Produk Teh Celup Gaharu dari Kampung Haha

Teh celup gaharu adalah minuman penyegar yang terbuat dari daun gaharu muda dari dua spesies gaharu yang tumbuh di Kampung Haha, yaitu: *Aquilaria malaccensis* Lamk (tumbuhan asli) dan *Gyrinops versteegi* Gilg (hasil introduksi). Nilai tambah dari produk ini adalah teh celup daun gaharu dipercaya oleh masyarakat sebagai penurun tekanan darah dan antioksidan.

Kampung Haha di Distrik Saremuk, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya dikenal sebagai Kampung Gaharu. Di kampung ini, selain tumbuh alami di hutan alam, kedua jenis pohon gaharu ini juga ditanam di lahan seluas lima hektare milik masyarakat, ditanam di beberapa tempat dan di pekarangan rumah warga.






Membuat minuman penyegar atau membuat teh daun gaharu merupakan “produk antara atau hasil antara”, yaitu sambil menunggu pohon gaharu menghasilkan getah (gubal) yang harum, pucuk daun gaharu dapat digunakan sebagai bahan baku teh celup. Tiga KTH Kampung Haha yang terdiri dari KTH Imian, KTH Sesna, dan KTH Nagi bersama-sama membuat teh celup daun gaharu dua rasa, yaitu rasa sedikit pahit (*G.versteegi* Gilg.) dan rasa teh hijau (*A. malaccensis*). Saat ini teh celup daun gaharu tersedia dalam kemasan 250g.



Daun gaharu (atas) untuk dibuat menjadi teh gaharu (bawah).

Selain teh daun gaharu, kegiatan ekonomi yang selama ini rutin dilakukan oleh KTH adalah pembibitan gaharu, walaupun masih berskala kecil. Bibit gaharu di daerah kampung ini dijual dengan harga Rp10.000 hingga Rp15.000 per batang. Semua ini juga merupakan ide mereka, meskipun setelah melakukan beberapa percobaan injeksi inokulan, tetapi belum menghasilkan kayu gubal gaharu, namun mereka tetap membudidayakan bibitnya, apalagi pohon penghasil gubal gaharu alam yang semakin jauh jarak jangkauannya dari kampung

Potensi HHBK berkualitas tinggi lainnya yang sedang dikembangkan di kampung ini adalah madu yang dihasilkan oleh lebah tak bersengat (*Tetragonula biroii*), yang dikenal dengan istilah 'hok' dalam bahasa lokal suku Imian. Madu *hok* sudah dikonsumsi turun-temurun, tapi tidak pernah dibudidayakan. Biasanya orang mengambil madu saat beraktivitas di hutan atau kebun. Setelah mengikuti pelatihan budidaya *hok*, mereka termotivasi untuk menjadikan Kampung Haha sebagai kampung madu. Untuk melakukan ini, mereka secara mandiri mensurvei dan menandai lokasi *hok* yang ditemukan di dalam hutan.

				
PERSIAPAN	PEMASAKAN	PENYARINGAN	PRODUK	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetikan dan pembersihan daun gaharu 2. Seleksi daun gaharu yang sehat (tidak cacat/rusak) 3. Daun gaharu dipotong-potong kecil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daun gaharu ditimbang untuk mengetahui berat basah (awal) 2. Daun gaharu dijemur hingga mencapai berat konstan (kering) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daun gaharu dihaluskan (dapat menggunakan blender) 2. Serpihan daun gaharu dimasukkan ke dalam kantong teh celup dan dikemas 	<p>Teh Celup Daun Gaharu</p>	

Produk Teh Celup Sarang Semut dari Kampung Wendi

Teh celup sarang semut merupakan produk minuman kesehatan yang terbuat dari sarang semut (*Myrmecodia* spp.) yang populer sebagai obat tradisional dan dipercaya dapat mengobati berbagai penyakit seperti kanker, penyakit jantung dan penyakit ginjal. Bahan baku menggunakan umbi/punuk berongga sebagai tempat sarang semut.

Di Tanah Papua, keanekaragaman dan persebaran jenis tumbuhan sarang semut cukup tinggi. Salah satunya di Kampung Wendi, Distrik Sawiat, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Sarang semut (*Myrmecodia* spp.) ini banyak ditemukan di hutan alam kampung ini.






Menurut karakteristik sarang semut, warga kampung membagi sarang semut menjadi tiga jenis: jantan merah, jantan putih, dan betina merah. Harga setiap sarang semut berbeda-beda, dan harga sarang semut jantan merah sedikit lebih tinggi dibandingkan jenis lainnya. Sarang semut yang dipanen biasanya dipotong-potong menjadi bongkahan, dijemur, dan dijual langsung ke pengepul di Kota Sorong. Melalui pendampingan, ketiga KTH di Kampung Wendi (KTH Wendi-1, KTH Wendi-2 dan KTH Lembah Hijau) bersama-sama membuat teh celup sarang semut. Teh celup sarang semut saat ini tersedia dalam kemasan 250g.

Selain teh sarang semut, ketiga KTH di Kampung Wendi juga mempraktikkan budidaya lebah tanpa sengat ('hok' dalam bahasa suku Imian). Faktanya, warga kampung telah mengkonsumsi madu *hok* secara turun-temurun, namun tidak pernah membudidayakan. Dalam kesehariannya, mereka mengumpulkan madu sambil beraktivitas di

hutan atau kebun. Saat ini mereka sedang membiakkan lebah 'hok' jenis *Tetragonula biroii* dan *Heterotrigona itama* setelah mengikuti pelatihan budidaya 'hok'. Terutama Kampung Wendi, karena pegunungan, sungai, dan air terjunnya yang indah, yang memiliki potensi ekowisata, mereka dapat membentuk usaha terpadu melalui Perhutanan Sosial. Dari ekowisata atau wisata edukasi, pengunjung dapat belajar tentang budidaya lebah madu saat berkunjung, dan menikmati madu secara langsung dari sarangnya.



Produk teh sarang semut dari Kampung Wendi.

				
PERSIAPAN	PEMASAKAN	PENGHALUSAN	PRODUK	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarang semut dipanen dan dibersihkan 2. Sarang semut dipotong-potong menjadi beberapa bagian 	<p>Potongan-potongan sarang semut dijemur hingga kering (konstan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarang semut dihaluskan (dapat menggunakan blender) 2. Serpihan sarang semut dimasukkan ke dalam kantong teh celup dan dikemas 	<p>Teh Celup Sarang Semut</p>	

Hasil Analisis Proses Pendampingan KTH untuk Membangun Ekonomi

1. Kondisi hutan alam mendukung untuk pemanfaatan HHBK, dan jasa lingkungan
2. Meningkatnya kewirausahaan berbasis HHBK dan jasa lingkungan
3. Permintaan komoditas HHBK tergolong cukup tinggi
4. Ada peran pemerintah melalui program Perhutanan Sosial
5. Ada program pemberdayaan dan pendampingan dari KPH dan mitra pembangunan
6. Ada program MBKM dan KKN dari Perguruan Tinggi setempat

PELUANG (OPPORTUNITY)

Rencana Tindak Lanjut (Strategi Prioritas W-O)

- (1) Sosialisasi tentang SOP, PIRT, dan BPOM untuk meningkatkan mutu kuantitas produk dengan izin edar produk industri rumah tangga
- (2) Membangun koordinasi, hubungan kemitraan, dan kerja sama yang baik yang saling memberikan manfaat diantara para pihak yang terkait
- (3) Pendampingan teknis dan manajemen, serta fasilitasi sarana prasarana melalui program pemerintah daerah dan pusat

Rencana Tindak Lanjut (Strategi Prioritas S-O)

- (1) Mengembangkan minat masyarakat (KTH) untuk memajukan produk HHBK unggulan melalui program pendampingan yang berkelanjutan
- (2) Meningkatkan potensi HHBK dan jasa lingkungan sebagai produk unggulan melalui program Perhutanan Sosial

Rencana Tindak Lanjut (Strategi Prioritas W-T)

1. Meningkatkan kapasitas SDM KTH untuk transfer/menguasai teknologi budidaya maupun pengolahan HHBK untuk meningkatkan daya saing melalui Diklat, magang, studi banding dan pengembangan dari hasil-hasil penelitian
2. Peningkatan promosi untuk perluasan pemasaran baik di tingkat lokal maupun nasional
3. Jaminan hukum atas lahan adat sesuai peraturan negara dan adat, misalInva Peraturan Kampung

Rencana Tindak Lanjut (Strategi Prioritas S-T)

1. Membuka informasi potensi dan produk-produk HHBK unggulan dari masing-masing kampung
2. Melakukan budidaya tanaman jenis HHBK secara intensif untuk memproduksi komoditas HHK selain dari hutan alam
3. Pendampingan KTH secara berkelanjutan untuk kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha
4. Peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk HHBK melalui bantuan fasilitas/modal, pengolahan, dan pasar

1. Kualitas produk HHBK yang belum standardisasi (belum ada SOP)
2. Produk HHBK belum memiliki izin peredaran pangan produksi industri rumah tangga (PIRT dan BPOM)
3. Fasilitas penunjang produksi/teknologi yang belum memadai sehingga masih menggunakan fasilitas/peralatan tradisional
4. Analisis model bisnis belum tersedia
5. Kegiatan/media promosi belum ada
6. Kurangnya koordinasi dengan para pihak (KPH, Aparat Kampung, warga kampung, dll)

KELEMAHAN (WEAKNESS)

KEKUATAN (STRENGTH)

1. Memiliki kelembagaan Kelompok Tani Hutan/ KTH (SK Pendirian, AD/ART, Struktur Organisasi dan Tupoksi)
2. Memiliki VISI-MISI dan Rencana Kerja Kelompok (RKK)
3. Potensi sumber daya alam HHBK dan jasa lingkungan cukup besar
4. Komoditas HHBK sebagai produk unggulan setempat
5. Partisipasi aktif (aksi swadaya) dari anggota KTH

ANCAMAN (THREATS)

1. Akses pemasaran relatif jauh
2. Persaingan produk HHBK sejenis dari daerah lain
3. Belum ada dukungan dari program dana desa/BUMDes
4. Alih fungsi lahan dan/atau kelangkaan/menipisnya ketersediaan sumber daya alam



Pelatihan Budidaya Lebah Madu bagi Kelompok Tani Hutan di Kampung Dukungan FORCLIME di Papua Barat

Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat kampung binaan, bersama Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorong Selatan, FORCLIME mengadakan pelatihan budidaya lebah madu bagi kelompok tani hutan di dua kampung dukungan di Provinsi Papua Barat, yaitu Wendi dan Haha yang terletak di Kabupaten Sorong Selatan. Kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 – 22 November 2022 di Kampung Wendi, dan 23 – 24 November 2022 di Kampung Haha. Peserta pelatihan adalah tiga kelompok tani hutan dari Kampung Wendi (Wendi 1, Wendi 2, Lembah Hijau) dan tiga dari Kampung Haha (Imian, Sesna and Nagi).

Para peserta mendapat pelatihan dari ahli lebah madu tanpa sengat, Dr Mahani, SP., M.Si., dari Fakultas Teknik Industri Pertanian, Universitas Pajajaran. Jenis lebah madu tanpa sengat yang diperkenalkan dalam pelatihan ini adalah dari species *Tetragonula biroi* dan *Heterotrigona itama*.

Selama pelatihan, para peserta mendapatkan pengetahuan, termasuk:

1. Teknik budidaya lebah trigona unggul.
2. Mengenal dan memilih lebah tanpa sengat untuk budidaya.
3. Teknik pembuatan 'stup' atau kotak untuk budidaya lebah.



Dalam pelatihan, para peserta mempraktikkan cara membuat kotak untuk budidaya lebah (stup). Selain itu, mereka juga mendapatkan pengetahuan lain berdasarkan pengalaman ahli dalam budidaya lebah madu, termasuk prospek ekonomi budidaya madu.

Dalam bahasa setempat, lebah tanpa sengat disebut 'hok' sedangkan lebah dengan sengat disebut 'towa'. Penduduk setempat telah menggunakan madu 'hok' sejak zaman dahulu, namun belum membudidayakan untuk tujuan komersial. Oleh karena itu, melalui pelatihan ini, mereka mendapatkan ilmu untuk mengembangkan budidaya lebah yang memiliki prospek secara ekonomi. Sehingga kedepannya dapat dijadikan pendapatan tambahan bagi mereka.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Melanesia Brigitte Boserren**, Advisor Junior bidang penghidupan (*livelihood*) pedesaan, pengelolaan dan konservasi hutan
2. **Nita Yohana**, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua Barat
3. **Mohammad Sidiq**, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Bappeda Sulawesi Tengah Gelar Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Cagar Biosfer Lore Lindu 2022

Dalam rangka mempersiapkan peninjauan berkala (*periodic review*) Cagar Biosfer Lore Lindu (CBLL) yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang, Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Cagar Biosfer Lore Lindu yang digawangi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Pertemuan Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Cagar Biosfer Lore Lindu tahun 2022. Tema pertemuan tahunan kali ini adalah "Membangun Komitmen untuk Pembangunan Berkelanjutan", dan dilaksanakan pada tanggal 16 November 2022 di Aula Pertemuan Polibu Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

Pertemuan dibuka oleh Bapak Drs. H. Ma'mun Amir selaku Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, yang memberikan apresiasi kepada Bappeda, para pihak dan mitra kerja terkait atas terlaksananya pertemuan tersebut. Beliau juga menyampaikan harapannya akan keterlibatan para pihak untuk mengintegrasikan aspek perencanaan dengan implementasinya, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhan mereka secara cukup.

Dalam pertemuan tersebut, dilaksanakan diskusi panel dengan mendatangkan dua pembicara yakni Prof. Dr. Ir. Y. Purwanto, DEA (Ketua Komite Nasional MAB Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional) yang memberikan arahan tentang pengelolaan cagar biosfer, persiapan



peninjauan berkala, dan *branding* produk, dan Christopher Eichhorn (GIZ FORCLIME Jakarta) yang berbagi pengalaman terkait pengelolaan Cagar Biosfer di Jerman. Terdapat pula *video message* dari Dr. Hans Decker Thulstrup (Kantor Pusat MAB UNESCO Paris). Selanjutnya, dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman sebagai komitmen bersama dari para pemerintah kabupaten/kota yang berada dalam kawasan CBLL untuk berkontribusi menuju pengelolaan CBLL yang berkelanjutan, yang meliputi Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi. Selain itu, dilaksanakan penyerahan sertifikat produk Cagar Biosfer ke sembilan UMKM yang telah terverifikasi oleh Tim Registrasi dan Verifikasi Produk CBLL. Produk-produk UMKM tersebut diantaranya adalah coklat, brownies crispy, bagea coklat, bawang goreng, dan kopi. Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah penyusunan masterplan CBLL dan pengisian formulir peninjauan berkala CBLL.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Fikty Aprilinayati**, Advisor bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Pengelolaan Cagar Biosfer
2. **Ismet Khaeruddin**, Advisor Senior, Focal Point Keaneekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Bimbingan Teknis Susun Rencana Pengelolaan Jangka Panjang bagi KPH di Papua

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, didukung FORCLIME dan mitra pembangunan lainnya (*Global Green Growth Institute-GGGI*), mengadakan bimbingan teknis (*coaching clinic*) mengenai penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) bagi empat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Papua, yaitu: KPHP Unit XXI Lintas Sarmi-Mamberamo, KPHP Unit XXIII Sarmi, KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura, KPHP Unit XXIX Keerom. Kegiatan tersebut dilakukan secara *hybrid (online dan offline)* pada tanggal 16 – 17 November 2022, dan dibuka oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Jan Jab Ormuseray, S.H, M.Si.

Sesi ini merupakan tahapan sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Bimbingan teknis ini dilakukan untuk memberikan arahan dan pedoman bagi tim penyusunan RPHJP di KPH bagaimana tahapan dan proses dalam melakukan revisi/penyusunan dokumen perencanaan tersebut.

Narasumber dalam acara bimbingan teknis tersebut, termasuk dari:

- **Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan (Kementerian LHK)**, Kepala Subdit Pemolaan kawasan KPHL, bapak Drajat Kurniadi, S.Hut, M.Si., membawakan materi tentang kebijakan pengelolaan hutan dan penyusunan peta arahan pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung untuk perencanaan bina pemanfaatan hutan.
- **Pokja Pengarusutamaan Gender (Kementerian LHK)**, ibu Ernawati Eko Hartono, S.Hut., M.Si., memberikan materi terkait pengarusutamaan gender dalam perencanaan kehutanan. Dalam sesinya dibahas bagaimana mengintegrasikan isu gender dalam kegiatan pengelolaan hutan termasuk di KPH.
- **Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan KLHK (Kementerian LHK)**, Ketua Pokja II subdit Pembinaan KPH, ibu Ir. Eleonora Poerwanti, M.M., memberikan materi terkait penyusunan RPHJP melalui sistem informasi RPHJP, selain itu, juga membahas hal-hal terkait penyusunan, penilaian dan pengesahan RPHJP.
- **Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah X Papua (Kementerian LHK)**, bapak Rahmat Suprianto, S.Hut., memberikan materi terkait analisis spatial dalam perencanaan kawasan hutan di KPH.
- **Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua**, bapak Ridwan Atmojo ST.,M.Si., menjelaskan pentingnya perencanaan kehutanan di tingkat KPH. Selain itu, juga menjelaskan bahwa 84%



kampung ada di dalam kawasan hutan yang artinya saling berkaitan erat antara masyarakat dan hutan, sehingga dalam perencanaan kehutanan perlu juga diperhatikan aspek sosialnya.

Dalam diskusi disampaikan oleh para peserta tantangan pengelolaan hutan di Papua, seperti sebagai berikut:

- Wilayah pengelolaan yang cukup luas dan akses yang sangat sulit.
- Sumber daya manusia, jumlah tidak sesuai dengan luas wilayah. Selain itu, jumlah tenaga teknis yang terbatas, misanya bidang khusus: GIS.
- Sarana dan prasarana. Masih ada KPH yang belum memiliki ruang kantor sendiri (masih sewa), peralatan kerja terbatas, termasuk kendaraan operasional.

Dalam pertemuan ini Kepala KPHP Boven Digoel, Ade Jhon Moisiri, S.Hut., menyampaikan pengalaman dalam penyusunan RPHJP. KPHP Boven Digoel adalah satu-satunya KPH di Papua bahkan di Indonesia yang telah selesai menyusun dokumen RPHJP berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 8 tahun 2021.

‘Dengan adanya pemekaran provinsi, KPH-KPH akan terbagi ke dalam provinsi-provinsi yang baru. KPH yang ada di Provinsi Papua harus menjadi contoh bagi provinsi yang baru terbentuk, baik dalam perencanaan hutan, juga dalam upaya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu,’ kata Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Provinsi Papua saat membuka acara

Tindak lanjut kegiatan bimbingan teknis ini adalah masing-masing KPH akan melakukan revisi atas RPHJP-nya. Termasuk juga KPH yang didukung FORCLIME, yaitu: KPHP Unit XXI Lintas Sarmi-Mamberamo, KPHP Unit XXIII Sarmi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Theodora F. Resubun**, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
2. **Mohammad Sidiq**, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

FORCLIME Forests and Climate Change Programme
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Mangala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia
Tel: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214
Fax: +62 (0)21 572 0193
www.forclime.org

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Surel korespondensi: ratu.widyawati@giz.de



Diimplementasikan oleh: **giz** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Bekerja sama dengan:

